

PELAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa kewajiban setiap instansi pemerintah untuk menyampaikan laporan kinerja secara periodik sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas.

Dengan berpedoman pada kedua regulasi tersebut, laporan kinerja triwulan memiliki kedudukan yang strategis, bukan hanya sebagai kewajiban administrasi, tetapi juga sebagai alat pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil.

Laporan Kinerja triwulan III tahun 2025 ini merupakan ikhtisar yang menggambarkan secara ringkas tentang capaian kinerja dalam kurun waktu tiga bulan yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

TRIWULAN III TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				REALISASI & CAPAIAN KINERJA												CAPAIAN KINERJA TAHUNAN (%)	PENGAMPU
				TAHUNAN	TRIWULAN				TAHUNAN	TRIWULAN											
					I	II	III	IV		I	II	III	IV	I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH																					
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten komponen Perencanaan (Meningkat Pada)	Nilai	24	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Bapperida		
2	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sasaran Perangkat Daerah Yang Memenuhi Target (Meningkat Pada)	Persen	71,4	-	-	-	71,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Bapperida		
3	Meningkatnya Inovasi Daerah yang Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Meningkat Pada)	Angka	55,8	-	-	-	55,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Bapperida		

Pencapaian kinerja pada periode ini menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, ditinjau berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Berikut penjelasan atas pencapaian kinerja sasaran yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Nilai SAKIP Kabupaten komponen Perencanaan

SAKIP merupakan hasil evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian PANRB. Komponen yang dinilai terdiri dari 4 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal. Nilai SAKIP menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented program*).

Nilai SAKIP komponen perencanaan merupakan Penilaian terhadap sejauh mana instansi pemerintah telah menyusun rencana kinerja yang jelas, terukur, dan selaras dengan tujuan organisasi. Dalam penilaian komponen Perencanaan Kinerja terdapat beberapa aspek, seperti:

- Dokumen Perencanaan: Ketersediaan dan kualitas dokumen perencanaan strategis (Renstra) dan dokumen perencanaan tahunan (Renja, Perjanjian Kinerja).
- Kesesuaian Target dan Tujuan: Seberapa baik target dan tujuan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan sejalan dengan sasaran pembangunan yang lebih tinggi.
- Penggunaan Indikator Kinerja: Penggunaan indikator kinerja yang tepat dan terukur untuk memantau pencapaian kinerja.

2. Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah

a. Persentase Sasaran Perangkat Daerah Yang Memenuhi Target

Sasaran Perangkat Daerah adalah target-target spesifik dan terukur yang ingin dicapai oleh setiap unit kerja atau instansi pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu, biasanya satu atau lima tahun. Sasaran ini merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

3. Meningkatnya Inovasi Daerah yang Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah

a. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. IID disusun oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam

Negeri, sebagai alat untuk mengevaluasi dan memotivasi pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, agar terus berinovasi.

Penilaian Indeks Inovasi Daerah mencakup beberapa aspek, termasuk:

- Inovasi tata kelola pemerintahan: Meliputi inovasi dalam manajemen internal, fungsi manajemen, dan pengelolaan unsur manajemen.
- Inovasi pelayanan publik: Meliputi proses pemberian layanan barang dan jasa kepada publik.
- Inovasi dalam bentuk lainnya: Meliputi inovasi yang terkait dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Bagi daerah yang berhasil menerapkan inovasi terbaik, Kemendagri memberikan penghargaan yang dikenal sebagai Innovative Government Award (IGA). Hasil penilaian IID dikelompokkan ke dalam beberapa kategori predikat, seperti Sangat Inovatif, Inovatif, dan Kurang Inovatif. Hasil ini bertujuan untuk mendorong daerah agar terus meningkatkan inovasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN (MENYAMPAIKAN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DALAM RANGKA MENCAPAI INDIKATOR KINERJA)

1. Desk Pohon Kinerja SKPD

Bapperida melaksanakan Desk Pohon Kinerja SKPD yang bertujuan untuk memastikan bahwa pohon kinerja hasil desk dengan Kemenpan RB telah dijadikan dasar penyusunan Renstra PD 2025-2045 dan rancangan awal Renja SKPD tahun 2026.

2. Verifikasi rancangan awal Renja SKPD tahun 2026

Bapperida Melaksanakan verifikasi terhadap rancangan awal Renja SKPD tahun 2026. Fokus verifikasi meliputi kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan serta keterkaitan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan SPM, IKK dan prioritas daerah / nasional.

3. Verifikasi penyusunan dokumen Renstra PD 2025-2045

Bapperida juga melaksanakan Verifikasi terhadap penyusunan dokumen

Renstra PD 2025-2045 yang fokus verifikasinya meliputi :

- keselarasan Tujuan dan Sasaran Renstra SKPD dan mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025 – 2030
- Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk periode 2025 - 2030
- Indikator program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada cascading pohon kinerja hasil desk dengan Kemenpan RB

4. Pengumpulan data Inovasi Daerah

Pengumpulan data Inovasi Daerah yang terinput pada Aplikasi SIID dan Kepmendagri yang nilai kematangannya minimal 100.

HAMBATAN (MENGGAMBARKAN TENTANG KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI SELAMA PERIODE TRIWULAN)

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan periode ini adalah sebagai berikut:

1. Tingginya intensitas penyusunan dokumen perencanaan pada tahun 2025 yaitu ada beberapa dokumen perencanaan yang disusun secara hampir bersamaan
2. Perlunya informasi perencanaan sampai pada yang melaksanakan Program karna Pemahaman terhadap perencanaan hanya terbatas pada ASN tertentu (Kasubag Perencanaan)
3. Masih dalam proses merumuskan dan mencari cara mendapatkan indikator "Persentase Kajian yang Dimanfaatkan"
4. Kegiatan lomba inovasi belum terlaksana karena masih menunggu regulasi terbaru dari Pemerintah Provinsi dan Pusat.

RENCANA AKSI (MENGGAMBARKAN RENCANA AKSI YANG AKAN DILAKSANAKAN DALAM RANGKA MENGATASI HAMBATAN)

Beberapa langkah perbaikan yang akan dilakukan antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas ASN Perencana dalam penyusunan dokumen perencanaan.
2. Disampaikannya kepada Pemangku Kepentingan terhadap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada saat Monitoring dan Evaluasi.
3. Mencari aturan yang tepat baik dari Provinsi dan Pusat.

4. Membuat Telaahan Staf kepada Kepala Daerah terkait jadwal kegiatan Lomba Inovasi Tingkat Kabupaten Tahun 2025.

B. REALISASI KEUANGAN

Tahun Anggaran 2025 Badan Perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sebesar **Rp. 15.632.675.105,39**

Tabel Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Badan Perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun Anggaran
2025 TW III

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI TRIWULAN III 2025 (Rp)	CAPAIAN %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BELANJA OPERASI	14.303.758.731,39	7.981.660.678	55,80
	Belanja Pegawai	8.474.080.326	5.372.556.606	63,40
	Belanja Barang dan Jasa	5.829.678.405,39	2.609.104.072	44,76
2	BELANJA MODAL	1.328.916.374	540.312.100	40,66
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	708.916.374	230.618.500	32,53
	Belanja Modal Aset Lainnya	620.000.000	309.693.600	49,95
	Jumlah Belanja	15.632.675.105,39	8.521.972.778	54,51

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025*

C. PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan III Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Triwulan III tahun 2025. Dari laporan ini dapat diketahui bahwa target Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) ditargetkan tercapai pada triwulan IV tahun 2025 sehingga pada periode triwulan III masih dalam proses penilaian. Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III ini, saran dan kritik selalu diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan kinerja pada waktu mendatang dan dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Demikian laporan kinerja Triwulan III Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut ini dibuat, semoga dapat menjadi salah satu bahan yang dapat memberikan data dan informasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada periode triwulan yang akan datang.

Pelaihari, 17 Oktober 2025

Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tanah Laut



Afrizal Akbar, SH

Pembina / IV a

NIP. 19810403 200212 1 008

LAPORAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TRIWULAN III TAHUN 2025
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

P

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Semua Bidang																											
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persen)	100.00	64,337,612,486	100.00	10,984,592,636	100	12,550,505,543	2,052,145,651	2,677,213,775	2,757,739,925	-	7,487,099,351	0.00%	59.66%	0.00	18,471,691,987	28.71%						Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah		
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Persen)	86.20	81.40	81.7												0.00%	0.00								
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah (%)	100.00	85,582,831	35,107,100	100	11,999,273	-	2,165,000	-	93	3,962,400	-	93	6,127,400	92.90%	51.06%	0.00	41,234,500	0.00%	97.67%					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	7.00	43,889,277	6.00	6,404,900	7	6,999,531	2	1,625,000	2	-	2	2,208,400	6	3,833,400	85.71%	54.77%	12.00	10,238,300	171.43%	23.33%			Tidak Ada	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.00	41,693,554	5.00	28,702,200	3	4,999,742	1	540,000	1	-	-	1,754,000	2	2,294,000	66.67%	45.88%	7.00	30,996,200	233.33%	74.34%			Tidak Ada	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah (%)	100.00	46,570,862,203	6,846,755,132	100	8,486,229,279	-	1,662,932,813	-	2,166,683,796	88	1,549,589,597	-	88	5,379,206,206	88.10%	63.39%	0.00	12,225,961,338	0.00%	46.43%				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	44.00	46,501,953,807	35.00	6,839,504,632	44	8,474,080,326	36	1,660,985,213	44	2,166,683,796	-	1,544,887,597	80	5,372,556,606	100.00%	63.40%	115.00	12,212,061,238	261.36%	26.26%			Tidak Ada	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5.00	68,908,396	5.00	7,250,500	5	12,148,953	3	1,947,600	2	-	-	4,702,000	5	6,649,600	100.00%	54.73%	10.00	13,900,100	200.00%	20.17%			Tidak Ada	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100.00	1,663,944,771	115,910,000	100	610,575,500	-	-	-	83	240,000,000	-	83	240,000,000	83.30%	39.31%	0.00	355,910,000	0.00%	36.25%					
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	44.00	140,865,260	99.00	20,000,000	44	35,575,500	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	99.00	20,000,000	225.00%	14.20%			Tidak Ada		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	99.00	1,523,079,511	16.00	95,910,000	99	575,000,000	-	-	-	-	240,000,000	-	240,000,000	0.00%	41.74%	16.00	335,910,000	16.16%	22.05%			Tidak Ada		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100.00	10,134,715,751	3,291,907,105	100	2,442,813,065	-	240,896,466	-	356,760,469	83	834,353,129	-	83	1,432,010,064	83.30%	58.62%	0.00	4,723,917,169	0.00%	216.12%				

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.00	144,048,193	1.00	18,413,220	1	24,900,342	-	4,805,980	1	4,947,500	1	3,551,000			1	13,304,480	100.00%	53.43%	2.00	31,717,700	200.00%	22.02%		Tidak Ada	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10.00	2,416,063,634	13.00	743,786,198	10	733,591,965	1	18,992,500	-	34,460,200	-	235,031,500			1	288,484,200	10.00%	39.32%	14.00	1,032,270,398	140.00%	42.73%		Tidak Ada	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.00	179,447,999	1.00	17,557,100	1	31,426,032	1	4,629,700	-	8,824,500	-	-			1	13,454,200	100.00%	42.81%	2.00	31,011,300	200.00%	17.28%		Tidak Ada	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.00	180,631,017	4.00	46,625,200	5	46,854,488	1	11,765,000	-	9,033,000	-	5,012,200			1	25,810,200	20.00%	55.09%	5.00	72,435,400	100.00%	40.10%		Tidak Ada	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.00	20,870,374	1.00	3,000,000	1	3,000,000	-	750,000	1	750,000	-	750,000			1	2,250,000	100.00%	75.00%	2.00	5,250,000	200.00%	25.16%		Tidak Ada	
		Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	3.00	94,228,743	1.00	15,000,000	3	17,747,250	-	-	-	-	-	-			-	-	0.00%	0.00%	1.00	15,000,000	33.33%	15.92%		Tidak Ada	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12.00	6,763,427,432	350.00	2,446,609,387	12	1,580,294,930	30	199,953,286	30	297,423,269	30	590,008,429			30	1,087,384,984	100.00%	68.81%	380.00	3,533,994,371	3166.67%	52.25%		Tidak Ada	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.00	335,998,359	1.00	916,000	1	4,998,058	-	-	-	1,322,000	-	-			-	1,322,000	0.00%	26.45%	1.00	2,238,000	100.00%	0.67%		Tidak Ada	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100.00	239,815,153		-	100	92,699,581	-	-	-	-	83	-			-	83	-	83.30%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
		Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	59.00	239,815,153	0.00	-	59	92,699,581	-	-	-	-	-	-			-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		Tidak Ada	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100.00	2,617,104,203		378,666,585	100	490,068,065	-	95,661,772	-	112,733,110	83	93,005,199			-	83	301,400,081	83.30%	61.50%	0.00	680,066,666	0.00%	49.40%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12.00	1,162,149,124	12.00	66,752,942	12	200,000,000	1	22,290,388	6	41,013,670	9	23,436,407			9	86,740,465	75.00%	43.37%	21.00	153,493,407	175.00%	13.21%		Tidak Ada	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00	1,454,955,079	12.00	311,913,643	12	290,068,065	1	73,371,384	6	71,719,440	9	69,568,792			9	214,659,616	75.00%	74.00%	21.00	526,573,259	175.00%	36.19%		Tidak Ada	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100.00	3,025,587,574		316,246,714	100	416,120,780	-	50,489,600	-	41,036,400	83	36,829,600			-	83	128,355,600	83.30%	30.85%	0.00	444,602,314	0.00%	112.17%		

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	88.79%	46.22%							
Predikat Kinerja																	Tinggi	Sangat Rendah							
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Indikator Program Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Memenuhi Target (Persen)	75.00		0.00		60									0.00%		0.00					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
			Persentase Indikator Program Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA yang Memenuhi Target (Persen)	75.00		0.00		60									0.00%		0.00						
			Persentase Indikator Program Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Memenuhi Target (Persen)	75.00		0.00		60									0.00%		0.00						
			Persentase Kesesuaian Program RKPD dengan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persen)	100.00		99.20		100									0.00%		0.00						
			Persentase Kesesuaian Program RKPD dengan RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA (Persen)	100.00	2,073,930,964	99.20	739,680,466	100	363,052,874	36,985,000	41,980,000	70,511,400	-	149,476,400	0.00%	41.17%	0.00	889,156,866	42.87%						
			Persentase Kesesuaian Sasaran RKPD dengan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persen)	100.00		100.00		100									0.00%		0.00						
			Persentase Kesesuaian Sasaran RKPD dengan RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA (Persen)	100.00		100.00		100									0.00%		0.00						
			Persentase Kesesuaian Program RKPD dengan RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persen)	100.00		99.20		100									0.00%		0.00						
			Persentase Kesesuaian Sasaran RKPD dengan RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persen)	100.00		100.00		100									0.00%		0.00						
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Rekomendasi hasil Money yang diindaklanjuti Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia (Persen)	75.00				75	-	-		-		-			0.00%		0.00		0.00%				

			Persentase Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan RKPD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia (Program, Indikator dan Target) (Persen)	100.00	789,041,032		409,137,666	100	166,714,102	-	3,600,000		4,500,000		36,401,400	-	44,501,400	0.00%	26.69%	0.00	453,639,066	0.00%	189.29%		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2.00	158,905,140	2.00	7,666,980	2	16,149,486	-	-	-	-	-	16,135,320	-	16,135,320	0.00%	99.91%	2.00	23,802,300	100.00%	14.98%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1.00	166,647,762	2.00	12,409,142	1	6,180,652	-	-	-	-	-	491,200	-	491,200	0.00%	7.95%	2.00	12,900,342	200.00%	7.74%		Tidak Ada
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2.00	255,401,220	2.00	353,007,940	2	53,271,740	-	3,600,000	1	4,500,000	1	18,470,800	1	26,570,800	50.00%	49.88%	3.00	379,578,740	150.00%	148.62%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1.00	208,086,910	2.00	36,053,604	1	91,112,224	-	-	-	-	-	1,304,080	-	1,304,080	0.00%	1.43%	2.00	37,357,684	200.00%	17.95%		Tidak Ada
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Rekomendasi hasil Morev yang diindaklanjuti Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Persen)	75.00			75,090,600	75	73,042,824	-	27,010,000		17,680,000		3,510,000	-	48,200,000	0.00%	0.00		123,290,600	0.00%	60.59%		
			Persentase Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan RKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Program, Indikator dan Target) (Persen)	100.00	683,525,676		75,090,600	100		-	-	-	-	-		-		0.00%	0.00			0.00%			
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2.00	313,260,738	2.00	42,988,400	1	59,451,650	-	24,310,000	1	12,200,000	1	1,530,000	1	38,040,000	100.00%	63.98%	3.00	81,028,400	150.00%	25.87%		Tidak Ada

		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1.00	152,140,000	1.00	15,455,000	1	3,301,458	-	-	2	1,080,000	-	1,080,000			2	2,160,000	100.00%	65.43%	3.00	17,615,000	300.00%	11.58%		Tidak Ada
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2.00	127,714,938	2.00	5,650,000	1	7,528,258	-	2,700,000	1	4,400,000	1	-			1	7,100,000	100.00%	94.31%	3.00	12,750,000	150.00%	9.98%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	1.00	90,410,000	1.00	10,997,200	1	2,761,458	-	-	-	-	-	900,000			-	900,000	0.00%	32.59%	1.00	11,897,200	100.00%	13.16%		Tidak Ada
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase capaian kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100.00				100		-	-	-	-	-				-	0.00%		0.00		0.00%				
			Persentase Rekomendasi hasil Money yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persen)	75.00	601,364,256		255,452,200	75	123,295,948		6,375,000		19,800,000		30,600,000			-	56,775,000	0.00%	46.05%	0.00	312,227,200	0.00%	177.39%		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2.00	116,203,606	1.00	20,274,000	1	20,848,388	1	1,575,000	-	-	-	6,750,000			1	8,325,000	100.00%	39.93%	2.00	28,599,000	100.00%	24.61%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1.00	152,970,650	1.00	18,490,000	1	8,102,560	-	-	-	-	-	-			-	-	0.00%	0.00%	1.00	18,490,000	100.00%	12.09%		Tidak Ada
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2.00	193,490,000	1.00	198,728,200	1	86,745,000	-	4,800,000	-	19,800,000	-	23,850,000			-	48,450,000	0.00%	55.85%	1.00	247,178,200	50.00%	127.75%		Tidak Ada

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya**):



No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah